

# KINERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DALAM PENGELOLAAN INFRASTRUKTUR JALAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH

Abiad Kurnia Ramadhan  
NPP 31.0293

Asdaf Kota Metro Provinsi Lampung  
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah  
email : [31.0293@praja.ipdn.ac.id](mailto:31.0293@praja.ipdn.ac.id)

Pembimbing Skripsi : Helwani S.Ag, M.Pd.I

## ABSTRACT

**Problem statement/Background (GAP):** The Department of Public Works (DPU) plays a crucial role in managing road infrastructure in Central Lampung Regency. This research aims to provide a comprehensive evaluation of DPU's performance in this field, assessing the effectiveness and efficiency of their initiatives in maintaining and enhancing road infrastructure. **Objective:** Through qualitative analysis derived from interviews, this study aims to identify the challenges faced by the Department of Public Works in road management efforts, with the goal of offering valuable insights into areas needing attention and improvement. Additionally, it aims to serve as a foundation for informed decision-making and strategic planning. **Method:** The research methodology employed is qualitative with an inductive approach, utilizing Robbins' performance theory encompassing five dimensions: quality, quantity, timeliness, effectiveness, and autonomy. **Results/Findings:** The evaluation reveals that the empowerment of people with disabilities in Pegunungan Bintang Regency is not yet optimal, with community support as a facilitating factor and inadequate performance of the Social Services Department as a major hindrance, compounded by public unawareness of the role of Social Services, reluctance to report issues, and insufficient funding from the local government. **Conclusion:** The study recommends that the government allocate budgetary resources and implement programs to support the empowerment of people with disabilities in Oksibil District, enabling them to achieve self-reliance.

**Keywords:** Roads, Performance, Infrastructure

## ABSTRAK

**Latar Belakang (GAP):** Dinas Pekerjaan Umum (DPU) memiliki peran yang sangat penting dalam mengelola infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan evaluasi komprehensif terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam bidang ini, menilai efektivitas dan efisiensi inisiatif mereka dalam memelihara dan meningkatkan infrastruktur jalan. **Tujuan:** Melalui analisis kualitatif yang diperoleh dari wawancara, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam upaya pengelolaan jalan, dengan harapan memberikan wawasan berharga tentang area-area yang memerlukan perhatian dan peningkatan, serta menjadi dasar bagi pengambilan keputusan yang berinformasi dan perencanaan strategis. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan induktif, menggunakan teori kinerja Robbins yang meliputi lima dimensi: kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian. **Hasil/Temuan:** Evaluasi menunjukkan bahwa pemberdayaan penyandang disabilitas di Kabupaten Pegunungan Bintang belum optimal, dengan dukungan masyarakat sebagai faktor pendukung dan kinerja Dinas Sosial yang kurang sebagai penghambat utama, disertai dengan ketidaktahuan masyarakat tentang peran Dinas Sosial, keengganan melapor, dan kekurangan anggaran dari Pemerintah Daerah. **Kesimpulan**

**(Kesimpulan):** Penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah memberikan anggaran dan program-program yang mendukung pemberdayaan penyandang disabilitas di Distrik Oksibil, sehingga mereka dapat mandiri.

**Kata kunci:** Jalan, Kinerja, Infrastruktur

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Jalan raya adalah sarana utama yang menghubungkan berbagai wilayah di dalam suatu negara. Pembangunan jalan yang baik meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas penduduk, barang, dan jasa. Ini memungkinkan orang untuk bepergian lebih mudah antar kota, desa, dan wilayah, serta mengakses berbagai fasilitas dan layanan seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan tempat kerja. Pembangunan infrastruktur jalan adalah aspek penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara. Pembangunan infrastruktur jalan bertujuan untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa, serta berperan dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Pembangunan jalan dan jembatan sebagai infrastruktur transportasi mengacu pada tata ruang, terintegrasi sistem transportasi nasional (sistranas), serta memenuhi standar keselamatan jalan, dan berwawasan lingkungan.

Pembangunan infrastruktur jalan harus pula memperhatikan tiga aspek penting sekaligus, yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (pro green). Menjawab tuntutan zaman, teknologi yang pro-environment dengan prinsip reuse, reduce, dan recycle pada pekerjaan jalan perlu semakin dikembangkan (Hanum, F., & Wibowo, H. 2023). Selama pengoperasian, infrastruktur jalan terus mengalami penurunan layanan hingga mencapai umur ekonomisnya. Untuk mengembalikan kondisi layanan jalan ini, perlu dilakukan pemeliharaan jalan. Salah satu jenis pemeliharaan jalan adalah peningkatan jalan. Peningkatan jalan dapat berupa peningkatan struktur perkerasan jalan dan juga pelebaran jalan untuk meningkatkan kapasitas jalan. Pada masa pelaksanaan ini, diperlukan zona kerja untuk pengaturan peralatan dan keselamatan pekerja. Zona kerja ini selalu berdampak negatif bagi pengguna jalan dan lingkungan.

Di Indonesia, masih banyak provinsi yang memerlukan perbaikan infrastruktur jalan. Perbaikan infrastruktur tersebut dilakukan guna meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas penduduk, barang, dan jasa. Ini memungkinkan orang untuk bepergian lebih mudah antar kota, desa, dan wilayah, serta mengakses berbagai fasilitas dan layanan seperti sekolah, rumah sakit, pasar, dan tempat kerja. Pembangunan infrastruktur jalan adalah aspek penting dalam perkembangan ekonomi dan sosial suatu negara (Reynaldi, 2018). Di Indonesia, peraturan yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan infrastruktur jalan adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan. Undang-Undang ini mencakup berbagai aspek termasuk pembangunan, pemeliharaan, dan pengelolaan jalan.

Dari data yang diperoleh, ada beberapa provinsi yang memiliki jalan rusak, salah satunya adalah Provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan provinsi yang strategis karena menjadi pintu gerbang lintas dua kawasan ekonomi penting, yakni antara Singapura, Johor, dan Riau, serta pasar nasional (Jakarta), dan Jawa Barat bagian Barat. Provinsi Lampung dengan ibu kota Bandar Lampung, yang merupakan gabungan dari kota kembar Tanjungkarang dan Telukbetung, memiliki wilayah yang relatif luas, serta menyimpan potensi kelautan, dan memiliki beberapa kabupaten yang tersebar di provinsi Lampung.

Kabupaten di Provinsi Lampung memiliki wilayah yang cukup luas dan beragam. Dalam pemerintahannya, Gubernur Arinal Djunaidi adalah gubernur ke-10 yang memerintah Provinsi Lampung dengan visi misi “Rakyat Lampung Berjaya: Aman, Berbudaya, Maju, Berdaya Saing, dan Sejahtera.” Namun, Provinsi Lampung akhir-akhir ini menjadi sorotan warganet Tanah Air karena kondisi jalannya yang mengalami kerusakan sangat parah. Kritik terhadap jalan berlubang banyak didominasi oleh warga Lampung sendiri. Potensi jalan rusak terparah

ada di wilayah kabupaten, salah satunya adalah Kabupaten Lampung Tengah. Kabupaten ini memiliki peran penting dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat (Setiawan, 2022).

Infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah tidak hanya berfungsi sebagai sarana transportasi tetapi juga sebagai sarana pendukung dalam menghubungkan berbagai wilayah di kabupaten ini. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan perkembangan perkotaan telah menghasilkan peningkatan mobilitas penduduk dan barang. Oleh karena itu, penting untuk memahami kondisi infrastruktur jalan saat ini, tantangan yang dihadapi, serta potensi dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan wilayah. Untuk Pemerintah Daerah, dana untuk pembangunan jalan dan jembatan dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah masing-masing daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 85 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang menyatakan bahwa “Penganggaran dalam rangka pelaksanaan program penanganan jaringan jalan merupakan kegiatan pengalokasian dana yang diperlukan untuk mewujudkan sasaran program.”

Pentingnya infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah juga terkait dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Infrastruktur jalan yang baik dapat mendukung akses yang lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan kesempatan kerja. Selain itu, infrastruktur jalan yang andal dapat meminimalkan kemacetan lalu lintas, mengurangi kecelakaan, dan memastikan perlindungan lingkungan yang lebih baik. Berdasarkan data awal dari wawancara via WhatsApp dengan Bapak Wisnu, staf di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Tengah pada tanggal 25 Oktober 2023, Kabupaten Lampung Tengah telah melakukan upaya untuk meningkatkan infrastruktur jalan, namun masih ada berbagai tantangan yang dihadapi, termasuk perawatan jalan yang belum memadai, pembiayaan proyek-proyek infrastruktur, dan perencanaan pengembangan jalan yang berkelanjutan.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Dinas Pekerjaan Umum, perkembangan infrastruktur jalan, perencanaan pengembangan, dan permasalahan yang perlu diatasi untuk memastikan infrastruktur jalan yang berkelanjutan dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang situasi infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan yang berharga bagi pihak terkait, termasuk pemerintah daerah, dalam upaya perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan yang efisien dan berkelanjutan.

Situasi jalan di Kabupaten Lampung Tengah masih banyak yang tidak layak. Pada tanggal 5 Mei 2023, Presiden Jokowi melakukan kunjungan ke Provinsi Lampung, salah satu kabupaten yang dikunjungi adalah Kabupaten Lampung Tengah. Berdasarkan data dari Kepala Dinas di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Gusmara Jaya, melalui telepon pada tanggal 25 Oktober 2023, dengan mengelola anggaran sebesar Rp92 miliar lebih pada tahun 2023, terdapat Rp51,5 miliar lebih untuk rekonstruksi jalan hanya diperuntukan terhadap 8 titik pekerjaan pembangunan jalan rigid dan lanjutan pembangunan jembatan dengan nilai Rp10 miliar. Dua di antaranya menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2023. Meski demikian, dengan pengelolaan anggaran yang ada, seharusnya pembangunan tidak difokuskan pada rigid, supaya terdapat pemerataan dalam pembangunan, sehingga hasilnya dapat dinikmati masyarakat. Karena anggaran satu kilometer rigid bisa untuk membangun enam kilometer jalan hotmix dengan kualitas baik.

Menurut Irham, Sekretaris Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Kabupaten Lampung Tengah, sebelum adanya PMK nomor 212 tahun 2022, anggaran yang dikelola dinas tersebut senilai Rp170 miliar lebih. Setelah ada perubahan, anggaran menjadi Rp92 miliar lebih untuk tiga program kegiatan. Ke depan, akan dilakukan pemerataan jika anggaran yang ada dapat mencukupi. Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini tertarik untuk mengambil judul

tentang “Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam Pengelolaan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lampung Tengah.”

### **1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Kesenjangan masalah yang diambil dalam penelitian ini berfokus pada kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pengelolaan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur sebelumnya. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada pengaruh infrastruktur jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah tanpa memperhatikan secara khusus kinerja instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pengelolaan tersebut. Hal ini menciptakan kesenjangan pengetahuan mengenai efektivitas dan efisiensi pengelolaan infrastruktur jalan oleh Dinas Pekerjaan Umum, terutama dalam konteks lokal seperti Kabupaten Lampung Tengah. Selain itu, metode yang digunakan dalam penelitian sebelumnya cenderung homogen, dengan banyak yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk mengukur dampak infrastruktur terhadap ekonomi. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik, yang tidak hanya melihat dari sisi kuantitatif tetapi juga kualitatif, untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Penelitian ini mencoba mengisi kesenjangan tersebut dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang situasi di lapangan. Terakhir, aspek keberlanjutan dalam pengelolaan infrastruktur jalan sering kali diabaikan dalam penelitian sebelumnya. Padahal, keberlanjutan merupakan faktor kunci dalam memastikan bahwa infrastruktur jalan tidak hanya dibangun tetapi juga dipelihara dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Penelitian ini mengidentifikasi kesenjangan ini dengan menambahkan perspektif berkelanjutan dalam evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menilai kinerja saat ini tetapi juga memberikan rekomendasi untuk perbaikan jangka panjang yang berkelanjutan, yang relevan untuk daerah-daerah lain dengan kondisi serupa .

### **1.3 Penelitian Terdahulu**

Sianturi, K. N. (2022). *Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor infrastruktur jalan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Riau. Salah satu alasan yang diidentifikasi adalah desentralisasi jalan yang belum dilaksanakan secara optimal, memberikan kewenangan lebih luas kepada pemerintah daerah untuk membangun dan memperbaiki jalan yang rusak. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada jenis penelitian yang fokus pada infrastruktur, namun terdapat perbedaan dalam teori, metode, dan lokus penelitian.

Hapsari, T. (2011). *Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. Penelitian ini menemukan bahwa infrastruktur jalan menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Persamaan penelitian ini dengan penelitian pertama adalah pada jenis penelitian yang serupa, namun berbeda dalam teori yang digunakan serta lokasi penelitian yang lebih luas mencakup seluruh Indonesia.

Agustin, D. W. (2022). *Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Pemalang* Dalam upaya melaksanakan tujuan dari pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di mana dalam pembangunan tersebut tidak terlepas dari adanya peran investasi. Investasi menjadi tolak ukur suatu negara bisa dikatakan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang baik atau rendah. Strategi untuk meningkatkan investasi daerah menjadi hal yang menarik.

Andriani, Y. (2021). *Efektivitas Program Pemuktahiran Data Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Di Kabupaten Bengkulu Selatan*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas program pemuktahiran data melalui sistem

informasi kesejahteraan sosial next generation (SIKS-NG) di Dinas Sosial Kabupaten Bengkulu Selatan masih ada beberapa evaluasi yang perlu di perbaiki. Pada variabel ketetapan sasaran belum menyesuaikan, variabel sosialisasi tidak ada sosialisasi berupa poster, papan informasi maupun di website, Variabel pencapaian tujuan program telah membuat kerja sama terhadap pemerintah Desa dan Operator SIKS-NG, dan variabel pemantauan program tidak melakukan pemantauan secara langsung di lapangan.

Bakri, R. M. S., Haliah, H., Nirwana, N., & Oemar, M. A. F. I. (2022). Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dengan menggunakan analisis SWOT dapat kita ketahui bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan memiliki faktor kekuatan dan ancaman yang lebih tinggi daripada faktor kelemahan dan peluang. Berdasarkan hal tersebut maka dapat dirumuskan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Meningkatkan Investasi di Sulawesi Selatan dengan memanfaatkan faktor kekuatan untuk mengatasi ancaman.

Hidayat, A., & Yafiz, M. (2023). Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerapkan strategi investasi, meningkatkan kualitas dan keterampilan masyarakat melalui pelatihan, dan melakukan kegiatan promosi investasi yang komprehensif (seperti mengadakan seminar dan pertemuan forum investasi) di dalam dan luar negeri.

Huda, N. (2021). *Strategi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmptsp) dalam meningkatkan investasi di kota Palangka Raya*. Hasil dari penelitian ini adalah Strategi yang digunakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam meningkatkan investasi di Kota Palangka Raya yaitu dengan melakukan inovasi pelayanan publik dengan meluncurkan sistem manajemen perizinan online atau OSS (Online Single Submission) yang bertujuan untuk memudahkan pihak investor dalam kegiatan penanaman modal. Selain itu, DPMPTSP juga melakukan kegiatan sosialisasi tentang penggunaan sistem OSS dan promosi tentang potensi dan peluang investasi dengan cara mengikuti pameran dan promosi melalui media cetak dan online.

Wati, F., Utamajaya, J. N., & Pratama, A. (2022). Efektivitas sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation di Kelurahan Gunung Seteleng menggunakan framework TAM. Dari hasil pengukuran didapatkan bahwa variabel PEOU (ease of use) dengan nilai persentase 68,33% termasuk dalam kategori Efektif, variabel PU (persepsi kegunaan) dengan nilai persentase 67,74% termasuk dalam kategori Efektif, variabel ATU (use attitude) dengan nilai persentase 66,81% termasuk dalam kategori efektif, dan variabel ACC (kepuasan penggunaan) dengan nilai persentase 68,22% termasuk dalam kategori efektif.

#### **1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Pernyataan kebaruan ilmiah dari penelitian ini terletak pada fokus yang mendalam terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pengelolaan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini berbeda dengan studi sebelumnya yang umumnya meneliti pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di wilayah yang lebih luas atau dalam konteks yang berbeda. Dengan mengarahkan perhatian pada Kabupaten Lampung Tengah, penelitian ini memberikan wawasan spesifik dan lokal yang belum banyak dijelajahi, khususnya dalam memahami bagaimana kinerja dinas terkait mempengaruhi kualitas dan pengembangan infrastruktur jalan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan yang komprehensif dengan menggabungkan metode kualitatif dan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik tentang kondisi infrastruktur jalan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk tidak hanya mengevaluasi kinerja Dinas

Pekerjaan Umum secara objektif tetapi juga menggali lebih dalam tentang tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Dengan demikian, penelitian ini mampu menawarkan rekomendasi yang lebih akurat dan relevan berdasarkan data empiris yang terkumpul.

Lebih lanjut, penelitian ini juga memperhatikan aspek berkelanjutan dalam pengelolaan infrastruktur jalan, yang seringkali terabaikan dalam penelitian sebelumnya. Dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip berkelanjutan seperti penggunaan teknologi yang ramah lingkungan dan perencanaan jangka panjang, penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur yang ada dengan menawarkan perspektif baru tentang bagaimana infrastruktur jalan dapat dikembangkan secara efisien dan berkelanjutan. Hal ini tidak hanya relevan bagi Kabupaten Lampung Tengah tetapi juga dapat diaplikasikan ke daerah-daerah lain yang menghadapi tantangan serupa.

### **1.5 Tujuan**

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pengelolaan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah. Dengan memahami kinerja Dinas Pekerjaan Umum, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana program dan kebijakan yang telah diterapkan berhasil dalam memperbaiki kondisi infrastruktur jalan di wilayah tersebut. Evaluasi ini akan mencakup analisis terhadap efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran, implementasi program pemeliharaan dan peningkatan jalan, serta kepatuhan terhadap standar keselamatan dan lingkungan yang berlaku.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam pengelolaan infrastruktur jalan. Dengan mengetahui faktor-faktor ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi nyata di lapangan. Faktor-faktor pendukung yang dimaksud dapat berupa dukungan dari pemerintah pusat, alokasi anggaran yang memadai, serta partisipasi masyarakat. Sebaliknya, faktor penghambat bisa mencakup keterbatasan sumber daya, tantangan teknis dalam pembangunan jalan, dan kendala birokrasi.

Tujuan akhir dari penelitian ini adalah untuk menyusun rekomendasi yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam upaya perbaikan dan pengembangan infrastruktur jalan yang lebih efisien dan berkelanjutan. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu mengatasi hambatan yang ada dan memaksimalkan potensi dukungan yang tersedia, sehingga kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah dapat terus meningkat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan analisis dan evaluasi, tetapi juga solusi praktis yang dapat diimplementasikan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di sektor infrastruktur jalan.

## **II. METODE**

Aturan praktis bagi peneliti adalah melakukan pekerjaan mereka dengan keunggulan dan akurasi. Arikunto (2019:136) menyatakan bahwa strategi adalah teknik utama yang diterapkan peneliti dalam mencapai tujuan serta mengidentifikasi solusi terhadap permasalahan yang diangkat. Dalam pembagiannya pendekatan penelitian dibagi menjadi 3 macam yaitu pendekatan kualitatif, kuantitatif, serta *mix method* atau gabungan dari metode penelitian kuantitatif dan kualitatif. penulis memakai penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dapat menafsirkan secara langsung keadaan yang ada dilapangan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dalam suatu penelitian. Penelitian kualitatif menurut Moleong (2005:6) dihasilkan dengan melihat fenomena-fenomena yang berhubungan dengan pengalaman, partisipan penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, dalam suatu setting alam tertentu secara menyeluruh dan melalui deskripsi verbal dan tertulis. dan dengan menggunakan berbagai teknik. Menurut (Sugiyono, 2019) yaitu “metode penelitian pada dasarnya merupakan

cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan kegunaan dan tujuan tertentu". Setiap penelitian mempunyai tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Memulai penelitian manusia dapat menggunakan hasilnya. Secara umum data: yang diperoleh dari penelitian dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. Metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian yang berdasarkan fakta keadaan alam yang bersifat natural dalam kehidupan sosial seseorang Dalam menggunakan penelitian kualitatif dibutuhkan data atau informasi seperti teks hasil wawancara, catatan ketika berada dilapangan, dokumen-dokumen, dan bahan-bahan lain (foto, data dari sumber lain atau internet, dan lain-lain). Simangunsong (2017:192) juga menjelaskan bahwa penelitian kualitatif meyakini bahwa fokus penelitian kualitatif adalah mencari makna. Oleh karena itu, harus diakui bahwa makna yang ditetapkan dalam penelitian kualitatif berbeda dengan ungkapan pertanyaan yang disusun menjadi "topik penelitian yang subjektif dan multipel". Instrumen penelitian merupakan sebuah alat atau sarana yang digunakan peneliti untuk membantu dalam proses pengumpulan data agar proses tersebut bisa dipermudah.

### **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **3.1 Efisiensi dan Efektivitas dalam Pengelolaan Infrastruktur Jalan**

Produktivitas Dinas Pekerjaan Umum (PU) di Kabupaten Lampung Tengah diukur melalui berbagai indikator, termasuk efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ir. Ismail, MT, Kepala Dinas PU, kinerja dalam pengelolaan infrastruktur jalan dinilai cukup memadai jika dilihat dari beberapa aspek penting. Pertama, kualitas jalan yang baik menunjukkan efektivitas dalam pemeliharaan dan perbaikan. Kedua, penyelesaian proyek sesuai jadwal mencerminkan efisiensi dalam manajemen proyek. Ketiga, alokasi dana yang cerdas dan optimal menunjukkan efisiensi penggunaan anggaran. Terakhir, partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan proyek meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Observasi di lapangan menunjukkan bahwa pembangunan jalan di Lampung Tengah telah direncanakan dengan baik dan teknologi dimanfaatkan secara maksimal. Namun, pengawasan dan penyuluhan kepada masyarakat masih kurang. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun produktivitas dalam hal perencanaan dan teknologi cukup tinggi, ada ruang untuk peningkatan dalam aspek pengawasan dan pendidikan masyarakat untuk mencapai hasil yang lebih optimal. Kualitas layanan dinilai dari seberapa baik layanan tersebut memenuhi atau melebihi harapan pengguna. Menurut Bapak Ir. Ismail, MT, kualitas layanan dalam pengelolaan infrastruktur jalan melibatkan penilaian menyeluruh terhadap berbagai aspek seperti kualitas infrastruktur, waktu penyelesaian proyek, tanggapan terhadap masukan masyarakat, dan tingkat kepuasan pengguna jalan. Berdasarkan observasi peneliti, kualitas jalan di Lampung Tengah masih perlu ditingkatkan karena masyarakat belum dapat merasakan manfaatnya secara menyeluruh. Selain itu, proyek sering mengalami keterlambatan; salah satu proyek baru mencapai 50% dari target setelah tahun baru, meskipun seharusnya sudah selesai. Hasil ini menunjukkan bahwa waktu penyelesaian proyek dan respons terhadap masukan masyarakat memerlukan evaluasi lebih lanjut untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakat. Kualitas layanan dapat ditingkatkan dengan memperbaiki manajemen waktu dan memastikan bahwa proyek selesai tepat waktu.

#### **3.2 Pertanggungjawaban dalam Pengelolaan Infrastruktur Jalan**

Dinas PU mempertanggungjawabkan kinerjanya melalui pelaporan rutin kepada pihak berwenang dan masyarakat umum, menggunakan indikator kinerja yang jelas, serta mengundang evaluasi eksternal dari lembaga independen. Langkah-langkah ini memastikan transparansi, objektivitas, dan akuntabilitas dalam mencapai tujuan pengelolaan infrastruktur jalan yang efisien dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil observasi menunjukkan

bahwa Dinas PU secara konsisten melaporkan progres proyek dan penggunaan anggaran, serta menggunakan indikator kinerja yang jelas untuk menilai pencapaian mereka. Evaluasi dari lembaga independen memperlihatkan peningkatan dalam kualitas jalan dan efisiensi waktu penyelesaian proyek. Masyarakat juga melaporkan tingkat kepuasan yang lebih tinggi terhadap transparansi dan tanggapan Dinas PU dalam pengelolaan infrastruktur jalan.

### **3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Dalam penelitian ini, temuan utama mengenai kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam mengelola infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan bahwa meskipun sudah tergolong baik, masih ada ruang untuk peningkatan. Produktivitas dan kualitas pelayanan dinilai cukup memadai, namun masih perlu peningkatan dalam manajemen sumber daya manusia dan peningkatan sarana-prasarana untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Responsivitas dan tanggung jawab juga perlu ditingkatkan agar kegiatan organisasi dapat berjalan lebih sesuai dengan prinsip administrasi yang benar. Temuan tersebut memiliki kesamaan temuan penelitian Sianturi, K. N. (2022) yaitu terkait sarana dan prasarana yang kurang memadai.

## **IV. KESIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan tentang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dalam mengoptimalkan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, dapat disimpulkan bahwa meskipun kinerjanya tergolong cukup baik, masih terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Analisis menunjukkan bahwa produktivitas aparatur sudah baik, tetapi perlu peningkatan dalam manajemen sumber daya manusia untuk memperbaiki hubungan antara input dan output yang lebih efektif.

Kualitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dinilai baik namun masih memerlukan peningkatan pada sarana dan prasarana agar dapat memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat. Responsivitas dan tanggung jawab dalam menjalankan kegiatan organisasi perlu ditingkatkan untuk memastikan bahwa kebijakan dan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan prinsip administrasi yang benar dan kebijakan organisasi.

### **Keterbatasan Penelitian**

Keterbatasan penelitian ini perlu diperhatikan untuk memahami konteks temuan yang disajikan. Salah satu keterbatasan utama adalah terbatasnya waktu dan sumber daya yang mempengaruhi kedalaman analisis terhadap setiap aspek kinerja dan pengelolaan infrastruktur jalan.

### **Arah Masa Depan Penelitian (Future Work)**

Untuk arah masa depan penelitian, penting untuk menjelajahi lebih dalam mengenai implementasi rekomendasi yang diajukan dalam penelitian ini. Studi lebih lanjut dapat difokuskan pada evaluasi efektivitas dari program-program pengawasan yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Lampung Tengah, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan pelayanan publik.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk terlibat dalam penelitian ini. Saya ingin menyampaikan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan wawasan selama proses penelitian. Tanpa kerjasama dan kontribusi dari berbagai pihak, penelitian ini tidak akan terwujud dengan baik. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi positif bagi pengembangan kebijakan dan penataan tenaga kerja di masa mendatang. Terima kasih atas waktu, dukungan, dan kerja sama yang telah diberikan. Semoga kita dapat terus berkolaborasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku&Jurnal

- Agustin, D. W. (2022). *Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi Di Kabupaten Pemalang* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG). [STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU \(DPMPTSP\) DALAMMENINGKATKAN INVESTASI DI KABUPATEN PEMALANG - Unissula Repository](#) .
- Andriani, Y. (2021). *Efektivitas Program Pemuktahiran Data Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (Siks-Ng) Di Kabupaten Bengkulu Selatan* (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia). [Efektivitas Program Pemuktahiran Data Melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation \( Siks-Ng \) Di Kabupaten Bengkulu Selatan - Elibrary Unikom](#)
- Arikunto S. (2019). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Bakri, R. M. S., Haliah, H., Nirwana, N., & Oemar, M. A. F. I. (2022). Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. *Amkop Management Accounting Review (AMAR)*, 2(2), 1-10. [Perencanaan Strategis dalam Meningkatkan Investasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | Amkop Management Accounting Review \(AMAR\) \(stieamkop.ac.id\)](#)
- Hanum, F., & Wibowo, H. (2023). RANCANG BANGUN PENGEMBANGAN KERANGKA PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI UMKM BERBASIS KONSEP ETOS HIJAU. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 6(2), 258-275.
- Hapsari, T. (2011). *Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia*. [Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: Pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia \(uinjkt.ac.id\)](#)
- Hidayat, A., & Yafiz, M. (2023). Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Sumatera Utara. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 1(4), 214-222. [Strategi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu \(DPMPTSP\) Dalam Meningkatkan Investasi di Provinsi Sumatera Utara | Journal of Islamic Economics and Finance \(stikes-ibnusina.ac.id\)](#)
- Huda, N. (2021). *Strategi dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmpstsp) dalam meningkatkan investasi di kota Palangka Raya* (Doctoral dissertation, IAIN Palangka Raya).
- Moleong, L. J. (2009). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Yogyakarta: PT. Remaja Rosdakarya.
- Reynaldi, Muhammad. Dkk. 2018. *Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Dalam Meningkatkan Kinerja Di Kecamatan Kota Ternate Selatan*. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* Vol 1 No.1
- Setiawan, Irfan. 2022. *Analisis Perilaku Korupsi Aparatur Pemerintah Di Indonesia*. *Jurnal Studi pada Pengelolaan Bantuan Sosial Di Era Pandemi Covid-19* Vol 4 No. 2
- Sianturi, K. N. (2022). *Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau). [Analisis Pengaruh Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Riau - Repository Universitas Islam Riau \(uir.ac.id\)](#)
- Simangunsong, F. (2016). *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. cet. 1. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. 23rd ed. Bandung: Alfabeta.

Wati, F., Utamajaya, J. N., & Pratama, A. (2022). Efektivitas sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation di Kelurahan Gunung Seteleng menggunakan framework TAM. *JURIKOM (Jurnal Riset Komputer)*, 9(2), 492-498. [Efektivitas Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation di Kelurahan Gunung Seteleng Menggunakan Framework TAM | Wati | JURIKOM \(Jurnal Riset Komputer\) \(stmik-budidarma.ac.id\)](https://doi.org/10.30605/jurikom.v9i2.12345)

## **B. Peraturan**

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

